

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)
TAHUN 2022**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dapat terselesaikan. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2022.

Nanga Bulik, Maret 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lamandau,

GANTI PHAING KANISA, S.STP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770225 199612 1 001



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra PD.....	II-1
2.2. Analisis Pelayanan Kinerja PD	II-8
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi....	II-18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	II-23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	IV-1
4.1. Program dan Kegiatan PD.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1



LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU
3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN LAMANDAU
4. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071028 Fax. 0532-2071096
Nanga Bulik 74611

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 555/ /KOMINFO/III/2021

TENTANG

RENCANA KERJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau tahun 2022, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2022;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Nomor);

21. *Peraturan Bupati.....*

21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor ... Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Nomor);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022**

KESATU : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2022 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau;

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal Maret 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lamandau,



GANTI PHAING KANISA, S.STP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770225 199612 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dimana telah terjadi pergeseran paradigma pola perencanaan pembangunan daerah, dari system top down menjadi bottom up. Untuk semuanya itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat menyusun suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan, maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan dimaksud, dalam hal ini perencanaan adalah suatu panduan menuju masa depan.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2022 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu dimaksud serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan dimasa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal.

Dalam penyusunan Renja ini terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, review terhadap rancangan RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan RENJA SKPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lamandau.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA



SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Nomor);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor ... Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Nomor ...);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.



1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Lamandau Tahun 2022 adalah:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kabupaten Lamandau.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra PD

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2020

Untuk evaluasi program tahun 2020 pagu anggaran dan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebesar **Rp. 5.362.847.229,-** (Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) terealisasi sebesar **Rp. 5.096.972.835,-** (Lima Miliar Sembilan



*Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) Pencapaian **95,04%**, dengan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 2.555.306.607,-** (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah) dan belanja langsung sebesar **Rp. 2.541.666.228,-** (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) yang dijabarkan melalui 10 Program dan 33 Kegiatan yaitu sebagai berikut :*

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2020 :

No.	Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA	5.362.847.229	5.096.972.835	95,04
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.596.150.260	2.555.306.607	98,43
	BELANJA LANGSUNG	2.766.696.969	2.541.666.228	91,87
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.111.849.486	944.564.045	84,95
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000	3.750.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.638.676	114.596.355	69,18
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.110.989.00	3.143.100.00	22,27
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	651.212.996.00	557.726.350.00	85,64
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.973.000.00	5.969.998.00	99,95
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.500.000.00	9.000.000.00	85,71
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000.00	44.998.750.00	100,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.500.000.00	28.496.800.00	99,99
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000.00	5.000.000.00	100
10	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	7.000.000.00	7.000.000.00	100,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.000.000.00	12.950.000.00	99,62
12	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi	32.047.699.00	31.880.799.00	99,48



	Ke Luar Daerah			
13	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	125.954.802.00	125.782.000.00	99,86
II.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80.120.000.00	79.709.664.00	99,49
1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	53.820.000.00	53.470.664.00	99,35
2	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	8.500.000.00	8.484.000.00	99,81
3	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	17.800.000.00	17.755.000.00	99,75
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	38.775.000.00	38.775.000.00	100
1	Pengadaan Pakaian khusus Hari-Hari tertentu	38.775.000.00	38.775.000.00	100,00
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	28.609.326.00	28.609.326.00	100.00
1	Pendidikan dan Pelatihan formal	28.609.326.00	28.609.326.00	100,00
V.	Pogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	34.960.000.00	34.809.800.00	99,57
1	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral	15.000.000.00	14.919.800.00	99,47
2	Kajian Akademis Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	4.960.000.00	4.960.000.00	100,00
3	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	15.000.000.00	14.930.000.00	99,53
VI.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Komunikasi	267.949.687.00	229.483.843.00	85,64
1	Penyediaan Internet Terpusat	21.890.687.00	19.897.087.00	90,89
2	Pengadaan Server dan Storage untuk Data Center	46.059.000.00	9.986.756.00	21,68
3	Renovasi Gedung RSPD	200.000.000.00	199.600.000.00	99,80
VII.	Program Pengembangan Layanan E-Goverment	85.129.500.00	78.904.500.00	92,69
1	Penggunaan Sistem Naskah Dinas Elektronik	23.346.250.00	23.313.750.00	99,86



2	Rapat Kerja Tim SPBE	8.178.250.00	4.975.000.00	60,83
3	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Aplikasi E-Kinerja	34.925.000.00	34.888.750.00	99,90
4	Pendampingan Penyiapan Aplikasi	18.680.000.00	15.727.000.00	84,19
VIII.	Program Pengelolaan Media Informasi Publik Dan Kehumasan	1.119.303.970.00	1.106.810.050.00	98,88
1	Pengelolaan RSPD	38.727.970.00	37.391.750.00	96,55
2	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Publik melalui Media	1.072.126.000.00	1.061.039.800.00	98,97
3	Rapat Kerja dan Kemitraan dengan Media	8.450.000.00	8.378.500.00	99,15
	JUMLAH	5.362.847.229.00	5.096.972.385.00	95,04

Sedangkan untuk capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau belum sesuai yang diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Di karenakan keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan.

2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 5.246.619.743,- (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) terurai dalam 6 program dan 18 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :



a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai, masih banyak Kepala Seksi atau jabatan Eselon IV yang masih belum terisi dan kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan belum sepenuhnya mendukung sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.

d. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan evaluasi yang menyangkut realisasi capaian target kinerja kegiatan. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target merupakan indikasi untuk dijadikan sebagai prioritas pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan permasalahannya. Evaluasi tersebut antara lain mencakup realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kegiatan yang menunjang pencapaian tugas dan fungsi pokok SKPD didasarkan kepada standar pelayanan minimum yang hendak dicapai yaitu melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis pelayanan tersebut sebagai wujud dalam menciptakan masyarakat Kabupaten Lamandau yang informatif, berteknologi dan berwawasan luas.

Penyelenggaraan pelayanan tersebut secara efektif dan efisien akan diatur dalam program perencanaan pembangunan 5 (lima) Tahunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Kepala Bidang dan 12 (dua belas) Kepala Seksi yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan asa desentralisasi dan tugas pembantuan.

2. Sekretaris

Sekretariat adalah unsur staf Satuan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, dan umum.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dan Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan perencanaan program dan menghimpun bahan penyusunan pelaporan.



4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan anggaran dinas, menghimpun bahan penyusunan pelaporan keuangan, serta melakukan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharaan.

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kersipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.

6. Kepala Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan

Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan hubungan fasilitasi, koordinasi, integrasi serta hubungan antar lembaga komunikasi pemerintah daerah, lembaga komunikasi sosial, media publik dan media penyiaran.

7. Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK

Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK mempunyai tugas penyiapan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, penyiapan standarisasi infrastruktur terhadap pemerintah dan publik, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban terhadap penyelenggara usaha telekomunikasi dan informatika dengan memanfaatkan sarana teknologi informatika baik perangkat lunak maupun perangkat keras serta pemberian rekomendasi/perizinan.



8. Kepala Bidang Pengembangan E-Government

Bidang Pengembangan E-Government mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan e-government.

9. Kepala Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian

Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian mempunyai tugas merencanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian Kabupaten Lamandau.

10. Kepala Seksi Kemitraan Media dan Informasi Publik

Seksi Kemitraan Media dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kemitraan Media, Informasi Publik, layanan kehumasan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi Publik.

11. Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Kelompok Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Kelompok Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas fasilitasi, koordinasi, integrasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, lembaga komunikasi pemerintah, lembaga komunikasi swasta dan media.

12. Kepala Seksi Produksi, Dokumentasi dan Diseminasi Informasi

Seksi Produksi, Dokumentasi dan Diseminasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi meliputi bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, industri, dan kesejahteraan rakyat, serta melakukan kegiatan penyebaran informasi kepada publik / masyarakat, dan dokumentasi.



13. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika

Seksi Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas penyiapan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, penyiapan standarisasi infrastruktur terhadap pemerintah dan publik.

14. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur TIK

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur TIK dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pengawasan, pengendalian dan pemrosesan ijin kegiatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

15. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK

Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas koordinasi, implementasi, dan pengembangan sumber daya TIK, serta monitoring dan evaluasi perkembangan sumber daya TIK dan sumber daya manusia.

16. Kepala Seksi Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

Seksi Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan aplikasi intra dan antar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

17. Kepala Seksi Penyelenggaraan Ekosistem E-Government

Seksi Penyelenggaraan Ekosistem E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan, fasilitasi tata kelola dan pengembangan ekosistem E-Government.



18. Kepala Seksi Tata Kelola E-Government

Seksi Tata Kelola E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan tata kelola E-Government.

19. Kepala Seksi Statistik Sektoral

Seksi Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pengordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan bidang statistik untuk bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau.

20. Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi

Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas menyiapkan nahan pengordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi pembangunan di Kabupaten Lamandau.

21. Kepala Seksi Persandian dan Pengamanan Data

Seksi Persandian dan Pengamanan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pengordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi pembangunan di Kabupaten Lamandau.

22. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

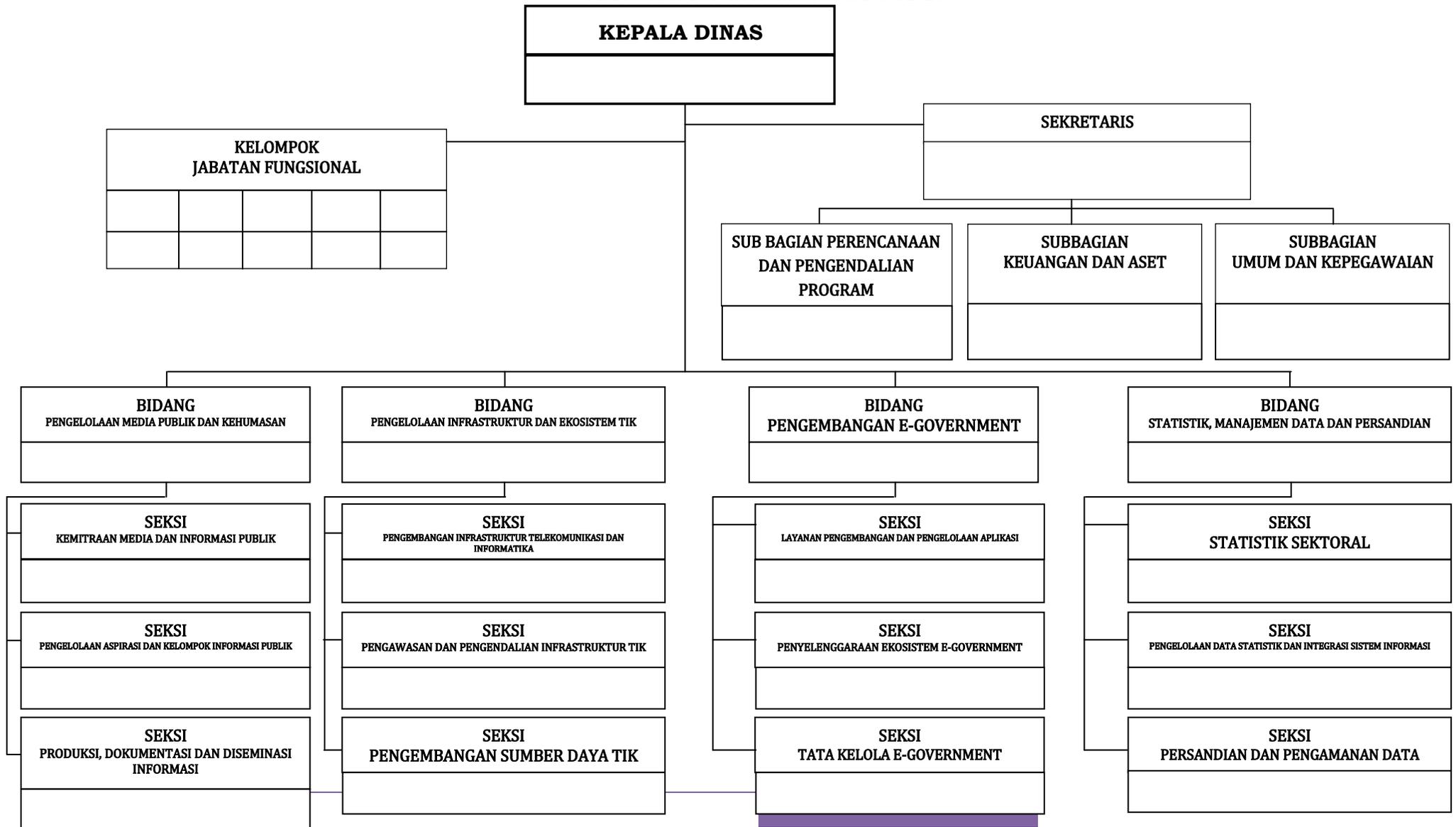
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, adalah pada **Gambar 2.2** berikut.



Gambar 2.2
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU
PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016





2.2.1 Sumber Daya

Sumber Daya Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau didukung oleh 47 (Empat Puluh Tujuh) orang Pegawai, terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) orang Pegawai Negeri Sipil atau 48,94% dan 24 (Dua Puluh Empat) orang Tenaga Harian Lepas atau 51,06%. Kondisi Kepegawaian Dinas Komunikasi Dan Informatika **25 Juni 2019** adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah Pegawai :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil Sebanyak 23 Orang
 - 2) Tenaga Harian Lepas (THL) 24 Orang
- b) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :
 - 1) Golongan IV sebanyak 3 orang;
 - 2) Golongan III sebanyak 14 orang;
 - 3) Golongan II sebanyak 6 orang;
- c) Berdasarkan Pendidikan :
 - 1) Sarjana (S-2) sebanyak 2 orang;
 - 2) Sarjana (S-1) sebanyak 13 orang;
 - 3) D-III sebanyak 2 orang;
 - 4) SLTA sebanyak 6 orang;
- d) Berdasarkan Eselonering :
 - 1) Eselon II sebanyak 1 orang;
 - 2) Eselon III sebanyak 5 orang;
 - 3) Eselon IV sebanyak 5 orang;
 - 4) Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 12 orang;
- e) Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :
 - 1) Diklatpim II sebanyak 1 orang;
 - 2) Diklatpim III sebanyak 3 orang;
 - 3) Diklatpim IV sebanyak 3 orang.



Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada
Tabel 2.3



TABEL 2.3
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas
Berdasarkan Golongan Ruang
(Per 25 Juni 2019)

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau																		Total			
			Kepala Satuan	Sekretaris	Subbagian Perencanaan Dan Pengendalian Program	Subbagian Keuangan	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Dan Ekosistem TIK	Bidang Pengembangan E-Government	Bidang Pengelolaan Media Publik Dan Kehumasan	Bidang Statistik, Manajemen Data Dan Persandian	Seksi Kemitraan Media Dan Informasi Publik	Seksi Pengelolaan Data Statistik Dan Integrasi Sistem Informasi	Seksi Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika	Seksi Layanan Penerimaan Dan Pengelolaan Aplikasi	Seksi Produksi, Dokumentasi, Disseminasi Dan Informasi	Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Infrastruktur Daya	Seksi Pengelolaan Aspirasi Dan Kelompok Masyarakat Publik	Seksi Statistik Sektor	Seksi Persandian Dan Pengamanan Data		Seksi Penyelenggaraan Ekosistem E-Government	Seksi Tata Kelola E-Government	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	PNS																							21
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pembina Tingkat I	IV/b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pembina	IV/a	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Penata Tingkat I	III/d	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Penata	III/c	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	Penata Muda	III/a	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6



Ranwal Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2022

	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	Pengatur	II/c	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
	Pengatur Muda Tingkat. I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	TENAGA HARIAN LEPAS	-	-	-	2	2	16	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
	TOTAL		1	1	3	4	19	1	4	1	3	1	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	47	



2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau. mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau adalah :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
2. Evaluasi, pengendalian dan pelaporan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
3. Bimbingan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pembinaan jabatan fungsional;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau tahun 2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2022 yaitu : **“Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”**

Untuk mewujudkan tujuan perangkat daerah tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk sasaran perangkat daerah. Sesuai dengan peran Dinas



Komunikasi dan Informatika, sasaran perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi “

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tujuan Perangkat Daerah dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau perlu dukungan yang besar dari masyarakat Kabupaten Lamandau.

Rekomendasi Strategis dalam rangka mewujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Lamandau :

- a. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen CPNS atau Tenaga Honorer/THL dengan konsekuensinya akan menambah anggaran.
- b. Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan monitoring.
- c. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan monitoring dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pemeliharaan aset dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.
- d. Aspek Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

Dunia komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di era global seperti saat ini. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi bahkan sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan, bahkan kini cenderung menjadi kebutuhan primer manusia. Dalam konteks pembangunan



daerah, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi juga telah berkembang dengan pesat. Semakin majunya teknologi berdampak pada kemudahan penduduk memperoleh informasi. Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Oleh karena itu, untuk memudahkan penduduknya mengakses informasi, Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki *website* resmi dengan alamat www.lamandaukab.go.id. Website Kabupaten Lamandau ini dapat dengan mudah diakses siapa saja. Website yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dari segi tampilan sudah interaktif dan menarik, dan dari segi *update* informasi sudah *up todate*. Diharapkan kedepannya website semakin interaktif dan informatif dalam menyampaikan informasi mengenai Kabupaten Lamandau.

Urusan Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 2008-2013, dapat terlaksana dengan baik. Adapun Sarana & Prasarana Komunikasi & Informatika di Kabupaten Lamandau hingga tahun 2017 :

NAMA_KETERANGAN	NILAI	SATUAN
I. Telekomunikasi		
1. Layanan Telepon Seluler		
1. Jumlah Desa Terlayani		
Lamandau	2	Desa
Delang	1	Desa
Bulik	6	Desa
Bulik Timur	2	Desa
Menthobi Raya	3	Desa
Sematu Jaya	5	Desa
Belantikan Raya	2	Desa
Batang Kawa	1	Desa



2. Jumlah Desa Belum Terlayani		
Lamandau	9	Desa
Delang	10	Desa
Bulik	8	Desa
Bulik Timur	10	Desa
Menthobi Raya	8	Desa
Sematu Jaya	3	Desa
Belantikan Raya	10	Desa
Batang Kawa	8	Desa
3. Jumlah BTS		
Lamandau	2	Unit
Delang	1	Unit
Bulik	24	Unit
Bulik Timur	2	Unit
Menthobi Raya	3	Unit
Sematu Jaya	4	Unit
Belantikan Raya	3	Unit
Batang Kawa	-	Unit
4. Jumlah Provider		
Lamandau	1	Provider
Delang	1	Provider
Bulik	4	Provider
Bulik Timur	2	Provider
Menthobi Raya	2	Provider
Sematu Jaya	3	Provider
Belantikan Raya	1	Provider
Batang Kawa	-	Provider
2. Layanan Telepon Kabel		
1. Jumlah Jaringan Telepon Tersedia		
Lamandau	-	SS
Delang	-	SS



Bulik	415	SS
Bulik Timur	-	SS
Menthobi Raya	-	SS
Sematu Jaya	-	SS
Belantikan Raya	-	SS
Batang Kawa	-	SS
2. Jumlah Jaringan Terpasang		
1. Jumlah Sambungan Rumah Tangga	273	SS
2. Jumlah Sambungan Perkantoran	143	SS
3. Jumlah Sambungan Swasta / Dunia Usaha	-	SS
4. Jumlah Telepon Umum Koin	-	SS
5. Jumlah Telepon Umum Kartu	-	SS
6. Jumlah Warung Telepon	-	SS
3. Layanan Internet		
1. Jumlah Desa Terlayani		
Lamandau	2	Desa
Delang	-	Desa
Bulik	6	Desa
Bulik Timur	2	Desa
Menthobi Raya	3	Desa
Sematu Jaya	5	Desa
Belantikan Raya	2	Desa
Batang Kawa	1	Desa
2. Jumlah Desa Belum Terlayani		
Lamandau	9	Desa
Delang	11	Desa
Bulik	8	Desa
Bulik Timur	10	Desa
Menthobi Raya	8	Desa
Sematu Jaya	3	Desa
Belantikan Raya	10	Desa
Batang Kawa	8	Desa



II. POS		
1. Jumlah Kantor Pos		
Lamandau	-	Desa
Delang	-	Desa
Bulik	1	Desa
Bulik Timur	-	Desa
Menthobi Raya	-	Desa
Sematu Jaya	1	Desa
Belantikan Raya	-	Desa
Batang Kawa	-	Desa
2. Jumlah Kantor Pos Pembantu		
Lamandau	-	Desa
Delang	-	Desa
Bulik	-	Desa
Bulik Timur	-	Desa
Menthobi Raya	-	Desa
Sematu Jaya	-	Desa
Belantikan Raya	-	Desa
Batang Kawa	-	Desa
3. Jumlah Desa Terlayani Pos Keliling		
Lamandau	-	Desa
Delang	-	Desa
Bulik	-	Desa
Bulik Timur	-	Desa
Menthobi Raya	-	Desa
Sematu Jaya	-	Desa
Belantikan Raya	-	Desa
Batang Kawa	-	Desa
III. Layanan Media Elektronik		
1. Radio		
1. Jumlah Stasiun Radio		
1. Jumlah Stasiun Radio Pemerintah	1	Stasiun



2. Jumlah Stasiun Radio Swasta	4	Stasiun
2. Cakupan Layanan		
1. Jumlah Kecamatan Terlayani	8	*
2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani	-	*
2. Televisi		
1. Jumlah Stasiun Televisi		
1. Jumlah Stasiun Televisi Pemerintah	-	Stasiun
2. Jumlah Stasiun Televisi Swasta	2	Stasiun
2. Cakupan Layanan		
1. Jumlah Kecamatan Terlayani	2	*
2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani	6	*
IV. Media Cetak		
1. Surat Kabar Nasional	10	
1. Jumlah Kecamatan Terlayani	8	
2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani	-	
2. Surat Kabar Lokal	9	
1. Jumlah Kecamatan Terlayani	8	
2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Lamandau yang mana terdapat beberapa usulan terkait peningkatan pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan minimnya sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat belum optimal, terdapat beberapa usulan dari masyarakat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau menginginkan peningkatan Sarana & prasarana komunikasi & informatika mengingat luas wilayah Kabupaten Lamandau yang cukup luas.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2022 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan



dalam rangka merealisasikan tujuan perangkat daerah dan sasaran perangkat daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2022 sesuai dengan Renstra adalah :**“Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi “**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau sesuai dengan Rencana Strategis yaitu : **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi”**.



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN PD

4.1 Program Dan Kegiatan PD

Rencana dan Program merupakan salah satu langkah implementasi tugas pelayanan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten lamandau merencanakan 5 Program dengan 7 Kegiatan dan 35 subkegiatan beserta pendanaan indikatif dari masing-masing program dan kegiatan dan telah di input pada Aplikasi Perencanaan Bappeda Kabupaten Lamandau.

Pada perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau untuk Tahun 2022 berikut untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

**TABEL 4.1 RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KABUPATEN LAMANDAU**

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan						
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										6,962,151,048	7,061,560,355						
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	1 Tahun	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	1 Tahun	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	1 Tahun	5,739,969,760	5,802,845,948	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
2	16	01	2	02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2,596,160,345	2,596,160,345	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
2	16	01	2	02	01	Sub. Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2596160345	2,596,160,345	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	03	Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	45,833,740	46,750,415	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
2	16	01	2	03	24	Sub. Keg. Pengadaan peralatan gedung kantor	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah peralatan gedung kantor	3 Paket	Jumlah peralatan gedung kantor	3 Paket	Jumlah peralatan gedung kantor	3 Paket	45,833,740	46,750,415	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	04	Keg. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tingkat Kepatuhan Pegawai	100%	Tingkat Kepatuhan Pegawai	100%	Tingkat Kepatuhan Pegawai	100%	180,000,000	183,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
2	16	01	2	04	06	Sub. Keg. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	48 Stell	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	48 Stell	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	48 Stell	50,000,000	51,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	04	09	Sub. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	24 Orang	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	24 Orang	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	24 Orang	130,000,000	132,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah bulan administrasi perkantoran terlaksana	100%	Jumlah bulan administrasi perkantoran terlaksana	100%	Jumlah bulan administrasi perkantoran terlaksana	100%	1,996,440,645	2,036,369,458	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
2	16	01	2	06	01	Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah gedung yang di instalasi	4 Gedung	Jumlah gedung yang di instalasi	4 Gedung	Jumlah gedung yang di instalasi	4 Gedung	8,347,350	8,514,297	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	06	02	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	31 Jenis	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	31 Jenis	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	31 Jenis	35,670,343	36,383,750	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	06	03	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga/perkantoran yang disediakan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga/perkantoran yang disediakan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga/perkantoran yang disediakan	12 Bulan	69,360,960	70,748,179	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

2	16	01	2	06	04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	300 Porsi	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	300 Porsi	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	300 Porsi	45,000,000	45,900,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	06	05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1000 Lembar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1000 Lembar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1000 Lembar	26,999,932	27,539,931	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	06	09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah	200 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah	200 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah	200 Kali	161,840,000	165,076,800	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	100%	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	100%	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	100%	824,611,030	841,103,251	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	08	01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah surat yang dikirim/paket pengiriman	750 Lembar	Jumlah surat yang dikirim/paket pengiriman	750 Lembar	Jumlah surat yang dikirim/paket pengiriman	750 Lembar	3,740,000	3,814,800	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	08	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Cakupan bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Cakupan bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	200,416,655	204,424,988	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	08	03	Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Cakupan bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Cakupan bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	23,100,000	23,562,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	08	04	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan bulan penyediaan jasa administrasi keuangan yang disediakan, cakupan bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Cakupan bulan penyediaan jasa administrasi keuangan yang disediakan, cakupan bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Cakupan bulan penyediaan jasa administrasi keuangan yang disediakan, cakupan bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	597,354,375	609,301,463	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	100%	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	100%	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	100%	96,924,000	98,862,480	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	09	01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Mobil Jabatan	45,184,000	46,087,680	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	09	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit	7,100,000	7,242,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	01	2	09	07	Sub Keg. Pemeliharaan aset tetap lainnya	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah atau luasan gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	Jumlah atau luasan gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	Jumlah atau luasan gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	44,640,000	45,532,800	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	02				Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	100%	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	100%	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	100%	1,148,502,674	1,183,562,220	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

2	16	02	2	01		Keg. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan Wilayah yang memiliki kesediaan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	100%	Cakupan Wilayah yang memiliki kesediaan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	100%	Cakupan Wilayah yang memiliki kesediaan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	100%	1,148,502,674	1,183,562,220	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	02	2	01	06	Sub Keg. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Pengelolaan RSPD, Terlaksananya penyebaran informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Publik melalui media	12 Media	Terlaksananya Pengelolaan RSPD, Terlaksananya penyebaran informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Publik melalui media	12 Media	Terlaksananya Pengelolaan RSPD, Terlaksananya penyebaran informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Publik melalui media	12 Media	1,131,627,157	1,166,349,193	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	02	2	01	11	Sub Keg. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya rapat kerja harmonisasi dan sinkronisasi PPID Utama dan PPID Pembantu	1 Laporan	Terlaksananya rapat kerja harmonisasi dan sinkronisasi PPID Utama dan PPID Pembantu	1 Laporan	Terlaksananya rapat kerja harmonisasi dan sinkronisasi PPID Utama dan PPID Pembantu	1 Laporan	16,875,517	17,213,027	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	03				Program Aplikasi Informatika	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bid. E-Gov) Persentase Sistem TIK yang terbangun dalam mendukung E-Gov (Bid. Infrastruktur)	100%	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bid. E-Gov) Persentase Sistem TIK yang terbangun dalam mendukung E-Gov (Bid. Infrastruktur)	100%	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bid. E-Gov) Persentase Sistem TIK yang terbangun dalam mendukung E-Gov (Bid. Infrastruktur)	100%	48,582,936	49,554,595	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	03	2	02		Keg. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	100%	Tersedianya Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	100%	Tersedianya Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	100%	48,582,936	49,554,595	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	03	2	02	01	Sub Keg. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Rapat Kerja Koordinasi dan Harmonisasi Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1 Kegiatan	Terlaksananya Rapat Kerja Koordinasi dan Harmonisasi Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1 Kegiatan	Terlaksananya Rapat Kerja Koordinasi dan Harmonisasi Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1 Kegiatan	24,582,936	25,074,595	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	16	03	2	02	10	Sub Keg. Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah area koneksi internet meningkat, Jumlah kualitas jaringan meningkat, Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana aplikasi e-kinerja	1 Kegiatan	Jumlah area koneksi internet meningkat, Jumlah kualitas jaringan meningkat, Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana aplikasi e-kinerja	1 Kegiatan	Jumlah area koneksi internet meningkat, Jumlah kualitas jaringan meningkat, Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana aplikasi e-kinerja	1 Kegiatan	24,000,000	24,480,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

2	20	02				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase OPD yg menggunakan /memperoleh sistem data dan statistik sektoral yang terintegrasi	100%	Persentase OPD yg menggunakan /memperoleh sistem data dan statistik sektoral yang terintegrasi	100%	Persentase OPD yg menggunakan /memperoleh sistem data dan statistik sektoral yang terintegrasi	100%	25,095,678	25,597,592	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	20	02	2	01		Keg. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diadakan	100%	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diadakan	100%	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diadakan	100%	25,095,678	25,597,592	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	20	02	2	01	01	Sub Keg.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Tahun	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Tahun	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Tahun	25,095,678	25,597,592	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
Jumlah																6,962,151,048	7,061,560,355		

Jumlah Program : 4
 Jumlah Kegiatan : 9
 Jumlah Sub Kegiatan : 22



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan telekomunikasi dan informatika di daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai telekomunikasi dan informatika.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2022 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, Maret 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lamandau

GANTI PHAING KANISA, S.STP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770225 199612 1 001

LAMPIRAN 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO KABUPATEN LAMANDAU SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2015			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)*	12
2.10	1	1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	100%				100%	100%		
2.10	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim/Paket Pengiriman	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	1	6	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional Yang Disediakan Jasa	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Bulan Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Bulan Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Bulan Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	1	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/Perkantoran Yang Disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	1	17	Penyediaan Makan dan Minum	Cakupan Bulan Penyediaan Makanan Dan Minuman	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Cakupan Bulan Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	1	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Cakupan Bulan Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%				100%	100%		
2.10	1	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Atau Luasan Gedung Kantor Yang Di Pelihara	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Kendaraan Yang Di Pelihara	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Yang Di Pelihara	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	2	42	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Di Rehab	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00
2.10	1	5		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny	100%				100%	100%		
2.10	1	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan Dan Pelatihan Yang Diikuti	60 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100	12 Orang	60 Orang	100.00

2.10	1	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang terpenuhi	100%						100%	100%		
2.10	1	15	3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi yang terpenuhi	10 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100	2 Kali	10 Kali	100.00		
2.10	1	15	8	Pengelolaan RSPD	Jumlah kecamatan yang terjangkau siaran RSPD	8 Kec	2 Kec	2 Kec	2 Kec	100	2 Kec	8 Kec	100.00		
2.10	1	16		PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Cakupan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi yang terpenuhi	100%						100%	100%		
2.10	1	16	1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi yang terpenuhi	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00		
2.10	1	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Cakupan Kerjasama Informasi dengan Mas Media yang terpenuhi	100%						100%	100%		
2.10	1	18	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah wilayah yang terjangkau Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00		
2.10	1	20		PROGRAM REHABILITAS DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS KOMUNIKASI	CAKUPAN REHABILITAS DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS KOMUNIKASI YANG TERPENUHI	100%						100%	100%		
2.10	1	20	1	Pemeliharaan Alat Kominfo	Cakupan Pemeliharaan Alat Kominfo yang terpenuhi	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	60 Bulan	100.00		
2.10	1	21		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG TERPENUHI	100%						100%	100%		
2.10	1	21	2	Sosialisasi Bidang Kominfo	Jumlah Sosialisasi Bidang Kominfo yang terpenuhi	10 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100	2 Kali	10 Kali	100.00		
2.10	1	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	CAKUPAN PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH YANG TERPENUHI	100%						100%	100%		
2.10	1	15	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah yang terpenuhi	60 Buku	12 Buku	12 Buku	12 Buku	100	12 Buku	60 Buku	100.00		
2.10	1	15	2	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah yang terpenuhi	60 Buku	12 Buku	12 Buku	12 Buku	100	12 Buku	60 Buku	100.00		

LAMPIRAN 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DISKOMINFO KABUPATEN LAMANDAU

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015 (thn n-2)	Tahun 2016 (thn n-1)	Tahun 2017 (tnn n)	Tahun 2018 (thn n+1)	Tahun 2015 (thn n-2)	Tahun 2016 (thn n-1)	Tahun 2017 (tnn n)	Tahun 2018 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat/publik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah jaringan komunikasi			32	33	34	35	32	33	34	35	
	Buku Kabupaten Dalam Angka			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Buku PDRB Kabupaten			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Rasio warnet terhadap penduduk			0.1728	0.1901	0.2091	0.23	0.1728	0.1901	0.2091	0.23	
4	Jumlah jaringan komunikasi setiap kecamatan			25	25	40	48	25	25	40	48	
5	Jumlah jaringan internet untuk umum terpasang			75.25	85.5	93.25	100	75.25	85.5	93.25	100	
6	Cakupan masyarakat yang terlayani			150	477	1264	1517	150	477	1264	1517	

Keterangan :

- * Rencana Review RPJPD/RPJMD Kabupaten Lamandau
- ** Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018
- *** Rencana Realisasi Target

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.							
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17																
	2	10	01	25	PROGRAM PENGELOLAAN MEDIA INFORMASI PUBLIK DAN KEHUMASAN	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Media Informasi Publik Dan Kehumasan Yang Terpenuhi	100.00 persen	511,810	0	0	100.00	1,148,076	1	5,810	18	210,732	-	-	-	-	7	216,542	100	20	7	216,542	100	541	Diskominfo			
			25	02	Rapat Kerja Harmonisasi dan Sinkronisasi PPID Utama dan PPID Pembantu	Jumlah PPID Utama Dan PPID Pembantu	8 Dokumen	101,438	0	0	1	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	0	-	Diskominfo			
			25	04	Pengelolaan RSPD	Jumlah Wilayah Yang Terjangkau Siaran Radio	8 Kecamatan	137,498	0	0	1	38,728	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	0	-	Diskominfo			
			25	06	Survei IKM	Hasil Survei	1 Laporan	30,000	0	0	1	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	0	-	Diskominfo			
			25	12	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Penyediaan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	20 Buah	101,438	0	0	12	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	0	-	Diskominfo			
			25	15	Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah dan Informasi Publik melalui Media	Jumlah Media Yang Menginformasikan Tentang Pembangunan Daerah	7 Media	40,000.00	0	0	7	1,098,347.90	7	5,810.00	-	210,732.40	-	0.00	-	0.00	-	0.00	7	216,542.40	100	19.71528329	7	216,542	100	541	Diskominfo	
			25	17	Rapat Kerja dan Kemitraan dengan Media	Jumlah Media Yang Menginformasikan Tentang Pembangunan Daerah	4 Kegiatan	101,437.50	0	0	1	11,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	0	-	Diskominfo			
												Rata-rata capaian kinerja (%)		16.67	3.29			16.67	90.23													
												Predikat kinerja																				
Faktor penghambat : Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan ke IV, seperti kegiatan Renovasi Gedung RSPD dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Publik Melalui Media (Kontrak dengan media), kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektor dan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi.																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Untuk tindak lanjutnya, akan dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terealisasi sesuai target.																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya* : Akan lebih cermat lagi dalam penyusunan kegiatan.																																

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Lamandau
Tahun 2020**

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan																						
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17																													
2	10	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	100.00 persen	6,827,256	0	0	100.00	1,068,078	13	140,848	20	209,213	-	-	-	-	561	350,060	273	369	561	350,060	55	44	Diskominfo																					
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan jumlah perangko yang tersedia	3750 Lembar	22,450	0	0	750	3,750	-	0.00	250	654.00	-	0.00	-	0.00	250	654.00	33	17.44	250	654	6.6666667	3	Diskominfo																					
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Cakupan bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 Bulan	942,218	0	0	12	162,020.59	3	23,039.78	3	20,994.28	-	0.00	-	0.00	6	44,034.06	50	27.17806113	6	44,034	10	5	Diskominfo																					
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	55 Blanko Pajak	30,466	0	0	11	14,110.99	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	-	-	0	-	Diskominfo																				
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	60 Bulan	2,263,595	0	0	12	620,413	3	85,212.56	3	129,945.10	-	0.00	-	0.00	6	215,157.66	50	34.67974662	6	215,158	10	10	Diskominfo																					
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	554,997	0	0	12	5,973.00	-	0.00	3	3,982.00	-	0.00	-	0.00	3	3,982.00	25	66.6666667	3	3,982	5	1	Diskominfo																					
			09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60 Bulan	59,865.75	0	0	12	10,500	-	0.00	3	2,700.00	-	0.00	-	0.00	3	2,700.00	25	25.71428571	3	2,700	5	5	Diskominfo																					
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	155 Jenis	211,402.26	0	0	31	45,000	-	0.00	-	17,577.50	-	0.00	-	0.00	-	17,577.50	-	39.06111111	-	17,578	0	8	Diskominfo																					
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5000 Lembar	246,946	0	0	1000	28,500.00	-	0.00	250	4,225.00	-	0.00	-	0.00	250	4,225.00	25	14.8245614	250	4,225	5	2	Diskominfo																					
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang di instalasi	10 Gedung	29,932.88	0	0	4	5,000	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	-	0	-	Diskominfo																					
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga/perkantoran yang disediakan	60 Bulan	510,654.85	0	0	12	7,000	-	0.00	3	4,655.00	-	0.00	-	0.00	3	4,655.00	25	66.5	3	4,655	5	1	Diskominfo																					
			17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	1500 Porsi	278,375.74	0	0	300	13,000	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	-	0	-	Diskominfo																					
			18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	500 Kali	1,197,307.82	0	0	100	79,213	20	7,495.20	-	0.00	-	0.00	-	0.00	20	7,495.20	20	9.462068245	20	7,495	4	1	Diskominfo																					
			19	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	500 Kali	479,045.732	0	0	100	73,597	10	25,100.00	10	24,480.00	-	0.00	-	0.00	20	49,580.00	20	67.36697156	20	49,580	4	10	Diskominfo																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																				21.03	28.38			4.21	3.40																								
Predikat kinerja																																																	
2	10	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100.00 persen	670,494	0	0	100.00	80,120	5	3,720	10	7,700	-	-	-	-	4	11,420	200	49	4	11,420	50	5	Diskominfo																					
			02	01	Pembuatan Cor Umbul-Umbul Plangson	Jumlah Cor Umbul-Umbul Plangson	1 Paket	50,000	0	0	1	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0	-	Diskominfo																				
			09	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	10 Unit	221,503	0	0	3	53,820	-	0.00	3	3,900.00	-	0.00	-	0.00	3	3,900.00	100	7.246376812	3	3,900	30	2	Diskominfo																				
			22	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Atau Luasan Gedung Kantor Yang Di Pelihara	10 Gedung	89,799	0	0	2	8,500	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	-	0	-	Diskominfo																				
			23	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	5 Unit	269,396	0	0	1	17,800	1	3,720.00	-	3,800.00	-	0.00	-	0.00	1	7,520.00	100	42.24719101	1	7,520	20	3	Diskominfo																				
			24	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Unit	89,797	0	0	2	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	0	-	Diskominfo																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				40.00	9.90			10.00	0.91																								
Predikat kinerja																																																	
2	10	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Jumlah Bulan Rata-Rata Aparatur Pemerintah Disiplin Hadir Dan Menggunakan Atribut Lengkap	100.00 persen	172,413.36	0	0	100.00	38,775	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo																				

			03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	225 Stell	172,413.360	0	0	47	38,775	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	-	0	-	Diskominfo																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Predikat kinerja																																																								
2	10	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APATARUR	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	100.00 persen	299,328.75	0	0	100.00	28,609	100	28,609.33	-	-	-	-	-	-	-	3	28,609.33	100.00	100.00	23.00	28,609.33	27.06	9.56	Diskominfo																											
			05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	85 Orang	299,328.750	0	0	23	28,609	23	28,609.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	23	28,609.33	100	100	23	28,609	27.0588235	10	Diskominfo																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											100.00	100.00																												
Predikat kinerja																																																								
2	10	01	19	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KOMUNIKASI	Cakupan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur dan Jaringan TIK Yang Terpenuhi	100.00 persen	1,309,045	0	0	100.00	282,950	6	16,218	1	3,128	-	-	-	-	-	2	19,345	200	52	2	19,345	58	3	Diskominfo																											
			19	12	Penyediaan Internet Terpusat	Seluruh internet OPD berasal dari DISKOMINFO dengan kualitas internet OPD yang memadai	4 Paket	675,000	0	0	1	36,890.69	1	15,758.69	-	3,127.50	-	0.00	-	0.00	1	18,886.19	100	51.19499943	1	18,886	25	3	Diskominfo																											
			19	15	Pengadaan Server dan Storage Untuk Data Center	Terjaminnya dan meningkatnya kinerja (kecepatan akses) Virtual Machine Data Center	3 Paket	434,045	0	0	1	46,059.00	1	459.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	459.00	100	0.996547906	1	459	33.3333333	0	Diskominfo																											
			19	17	Renovasi Gedung RSPD	Jumlah Renovasi Gedung RSPD	1 Gedung	200,000	0	0	1	200,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	-	-	0	-	Diskominfo																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																											66.67	17.40																												
Predikat kinerja																																																								
2	10	01	23	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN E-GOVERNMENT	Cakupan Layanan E-Government Yang Terpenuhi	100.00 persen	244,910	0	0	100.00	85,130	12	10,525	20	17,150	-	-	-	-	-	3	27,675	250	145	3	27,675	#VALUE!	52	Diskominfo																											
			23	04	Penggunaan Sistem Naskah Dinas Elektronik	Seluruh surat menyurat berbasis TNDE	29/7 OPD/Ked	47,910	0	0	1	23,346	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	-	-	#VALUE!	-	Diskominfo																										
			23	06	Pengembangan sistem Pengaduan masyarakat	Masyarakat bisa melakukan pengaduan dan mendapat respon terhadap pengaduan maksimal 24 jam	1 Aplikasi	35,000	0	0	1	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0	-	Diskominfo																										
			23	07	Rapat Kerja Tim Pengarah SPBE	Terlaksananya Rapat Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah Kabupaten Lamandau	4 Tim	61,000.00	0	0	1	8,178.25	1.0	4,975.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	4,975.00	100	60.8320851	1	4,975	25	8	Diskominfo																											
			23	11	Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Aplikasi E Kinerja	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Aplikasi E kinerja	1 Tahun	56,000.00	0	0	1	34,925.00	1	5,550.00	-	9,560.00	-	0.00	-	0.00	1	15,110.00	100	43.26413744	1	15,110	100	27	Diskominfo																											
			23	12	Pendampingan Penyiapan Aplikasi	Terlaksananya Pendampingan Penyiapan Aplikasi	2 Aplikasi	45,000.00	0	0	2	18,680.00	-	0.00	1	7,590.00	-	0.00	-	0.00	1	7,590.00	50	40.63169165	1	7,590	50	17	Diskominfo																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											50.00	28.95																												
Predikat kinerja																																																								
2	10	01	24	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	Cakupan pelaksanaan ststistik Sektoral	100.00 persen	402,046	0	0	100.00	34,960	14	4,960	-	-	-	-	-	-	1	4,960	100	100	1	4,960	25	7	Diskominfo																												
			24	01	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	20 Judul Bu	102,275	0	0	5	15,000	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	-	-	0	-	Diskominfo																										
			24	04	Membangun Metadata statistik sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	31 Metadata	113,815	0	0	1	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0	-	Diskominfo																										
			24	05	Kajian Akademis Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah Perda/Perbup	4 Perda/Pd	73,054	0	0	1	4,960	1	4,960.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	4,960.00	100	100	1	4,960	25	7	Diskominfo																											
			24	06	Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang memenuhi standar	4 Kali	33,206	0	0	1	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0	-	Diskominfo																										
			24	07	Literasi Keamanan Informasi	Jumlah sosialisasi	16 Kali	46,488.75	0	0	1	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0	-	Diskominfo																										
			24	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen di Bidang Keamanan Informasi	8 Dokumen	33,206.25	0	0	2	15,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	-	-	0	-	Diskominfo																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																											16.67	16.67																												
Predikat kinerja																																																								
2	10	01	25	PROGRAM PENGELOLAAN MEDIA INFORMASI PUBLIK DAN KEHUMASAN	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Media Informasi Publik Dan Kehumasan Yang Terpenuhi	100.00 persen	511,810	0	0	100.00	1,148,076	1	5,810	18	210,732	-	-	-	-	-	7	216,542	100	20	7	216,542	100	541	Diskominfo																											

		25	02	Rapat Kerja Harmonisasi dan Sinkronisasi PPID Utama dan PPID Pembantu	Jumlah PPID Utama Dan PPID Pembantu	8 Dokumen	101,438	0	0	1	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	Diskominfo																					
		25	04	Pengelolaan RSPD	Jumlah Wilayah Yang Terjangkau Siaran Radio	8 Kecamatan	137,498	0	0	1	38,728	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	Diskominfo																					
		25	06	Survei IKM	Hasil Survei	1 Laporan	30,000	0	0	1	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	Diskominfo																					
		25	12	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Penyediaan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	20 Buah	101,438	0	0	12	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	Diskominfo																					
		25	15	Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah dan Informasi Publik melalui Media	Jumlah Media Yang Menginformasikan Tentang Pembangunan Daerah	7 Media	40,000.00	0	0	7	1,098,347.90	7	5,810.00	-	210,732.40	-	0.00	-	0.00	7	216,542.40	100	19,715,283.29	7	216,542	100	541	Diskominfo																		
		25	17	Rapat Kerja dan Kemitraan dengan Media	Jumlah Media Yang Menginformasikan Tentang Pembangunan Daerah	4 Kegiatan	101,437.50	0	0	1	11,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	-	Diskominfo																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																				16.67	3.29			16.67	90.23																					
Predikat kinerja																																														
Faktor penghambat : Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan ke IV, seperti kegiatan Renovasi Gedung RSPD dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Publik Melalui Media (Kontrak dengan media), kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral dan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi.																																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Untuk tindak lanjutnya, akan dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terealisasi sesuai target.																																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : Akan lebih cermat lagi dalam penyusunan kegiatan.																																														